



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 12 November 2012

Halaman:

## Pemkot Incar Sungai untuk RTH

Abdul Hamied Razak

**JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai mengincar bantaran sungai untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah sulitnya mencari lahan kosong di tengah kota.**

Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja menyebutkan, luasan RTH di Kota Jogja saat ini 32,46% dengan luas taman sebesar 63.305 meter persegi. Dari luas tersebut sebanyak 17,96% merupakan RTH publik dan 14,59% adalah RTH privat.

Meskipun sudah melebihi ketentuan 30% seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, tetapi untuk kawasan RTH publik Jogja belum mencapai target. Itu berbeda dengan kesediaan RTH privat yang dinilai melebihi target. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.1/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau perkotaan, persentase luasan RTH setiap kota minimal 30% yang terbagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH privat 10%.

Pemkot Jogja, jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jogja Edy Muhammad, terus berupaya untuk mencapai bahkan melebihi target RTH yang ditentukan undang-undang. Selain akan terus mengoptimalkan lahan di kawasan kota, RTH baik yang publik maupun privat juga akan dilakukan di bantaran sungai yang melewati kota.

"Model pendekatan untuk membuka RTH sepanjang bantaran sungai lebih mudah dilakukan karena tanah wedi kengser. Ini berbeda dengan lahan lainnya di Jogja yang terkadang terbentur aturan," jelas Edy kepada *Harian Jogja* di sela-sela Gerakan Prokasih Sungai Winongo, Minggu (11/11).

Tanah wedi kengser merupakan tanah yang berada di bawah penguasaan negara yang terdapat di sepanjang aliran sungai dan pemanfaatannya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi alam. Meski demikian, Edy mengaku bukan berarti Pemkot hanya akan memanfaatkan tanah wedi kengser tersebut sebagai lahan untuk RTH untuk memenuhi target.

"Semua lahan yang memungkinkan bisa dijadikan RTH terus diupayakan. Misalnya embung Langensari dan beberapa lahan bekas sekolah yang saat ini masih kami kaji," tuturnya.

Disingung soal itu, Edy mengatakan pembukaan lahan RTH tidak melalui anggaran dana APBD. Tetapi, pemetaan kota hijau untuk RTH juga bisa dikembangkan melalui komunitas kota hijau dan mereka yang peduli untuk meningkatkan RTH. "Anggaran tidak harus dari APBD kota. Pihak swasta, melalui CRS-nya juga bisa melakukan," tukasnya.

Belum lama ini, Pemkot bersama SGM menambah fasilitas RTH di bantaran kali Gajahwong, RW 08 Kampung Gambiran Baru, Pandeyan, Umbulharjo seluas 5.000 meter persegi. Begitu juga di wilayah kumuh di bantaran Kali Buntung Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo kini disulap menjadi Karangwaru Riverside. Bila direalisasikan seluruh segmen tercapai, total dibutuhkan dana sekitar Rp29,7 miliar.

Kepala Bidang Penataan Pembangunan (Tapem) Kota Jogja, Udi Harsono mengatakan, belum tercapainya kuota RTH publik hingga kini disebabkan minimnya ketersediaan lahan. Hal itu dikarenakan, susah mencari lahan yang bisa dijadikan RTH. ([hamied@harianjogja.com](mailto:hamied@harianjogja.com))

Instansi	Nilai Berita
1. Bappeda	<input type="checkbox"/> Negatif
2. BLH	<input type="checkbox"/>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Amat Segera	Untuk Ditanggapi
2. Badan Perencanaan Pembangunan			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 19 Mei 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005